

Latar Belakang



Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan"

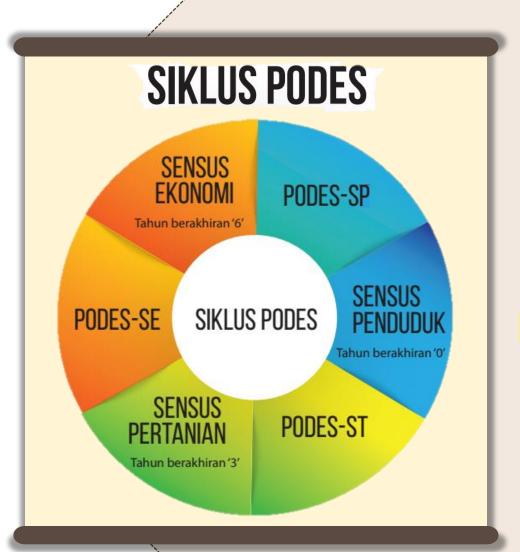


Pembangunan Desa dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.



Pendataan Potensi Desa (Podes) merupakan kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terendah setingkat desa/kelurahan, termasuk pendataan di kecamatan dan kabupaten/kota.

Pendataan Potensi Desa



- Pendataan Podes dilakukan 3 kali setiap 10 tahun mendahului kegiatan Sensus yang dilakukan oleh BPS.
- Pendataan Podes terakhir pada tahun 2018, yaitu 2 tahun menjelang Sensus Penduduk 2020.

Tujuan Pendataan Podes



Menghasilkan data potensi desa/kelurahan: sosial, ekonomi, sarana, prasarana wilayah.



Menyediakan karakteristik infrastruktur yang ada di daerahdaerah pinggiran.



Membentuk Indeks Pembangunan Desa (IPD).



Menghasilkan data klasifikasi/tipologi desa.



Sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik.



Informasi dasar untuk Sensus Penduduk 2020.

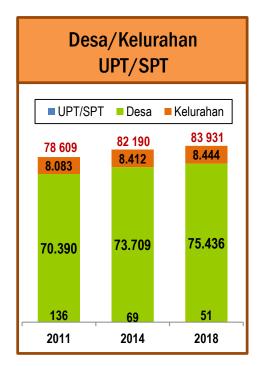
Cakupan Hasil Podes 2018

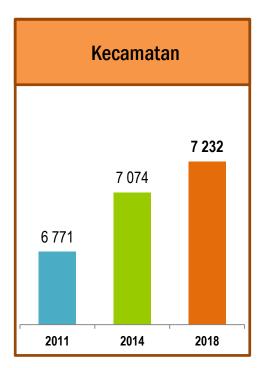
- Pendataan Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 di seluruh wilayah Indonesia.
- Pendataan Podes 2018 mencakup seluruh:
 - ✓ Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT)
 - ✓ Kecamatan
 - ✓ Kabupaten/Kota
- Syarat desa/kelurahan/UPT/SPT yang didata :
 - ✓ ada wilayah,
 - ✓ ada penduduk,
 - ✓ ada pemerintahan

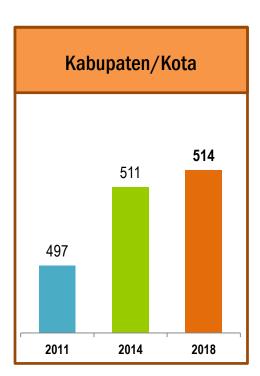
Cakupan dan Perkembangan Wilayah Administrasi

Hasil Pendataan Podes 2018:

- Sebanyak 83.931 wilayah administrasi setingkat desa meliputi:
 - √ 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat),
 - √ 8.444 kelurahan, dan
 - √ 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).
- Sebanyak 7.232 kecamatan dan 514 kabupaten/kota.







Indeks Pembangunan Desa (IPD)



IPD terdiri dari 5 dimensi, yaitu:

IPD

Ketersediaan **Pelayanan Dasar**

- 1. Fasilitas Pendidikan
- 2. Fasilitas Kesehatan

Kondisi Infrastruktur

- 1. Infrastruktur Ekonomi
- 2. Infrastruktur Energi
- 3. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi
- 4. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

Aksesibilitas/ **Transportasi**

- 1. Sarana Transportasi
- 2. Aksesibilitas Transportasi

Pelayanan Umum

- 1. Kesehatan Masyarakat
- 2. Olah Raga

Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1. Kemandirian
- 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)





Desa Mandiri



Desa Berkembang

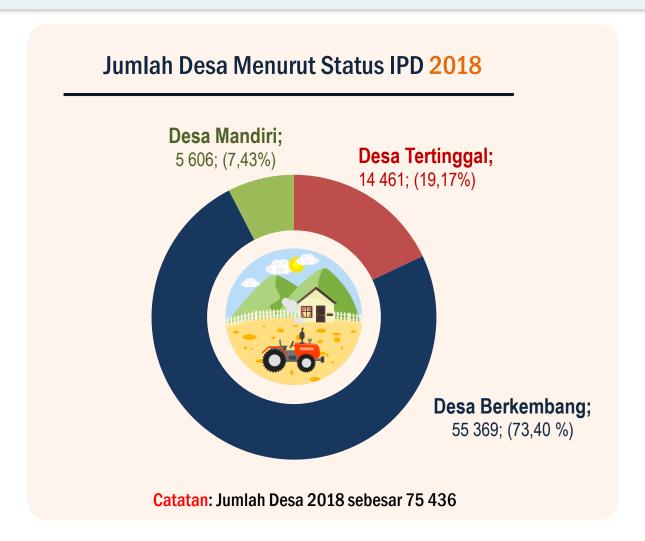


Desa Tertinggal



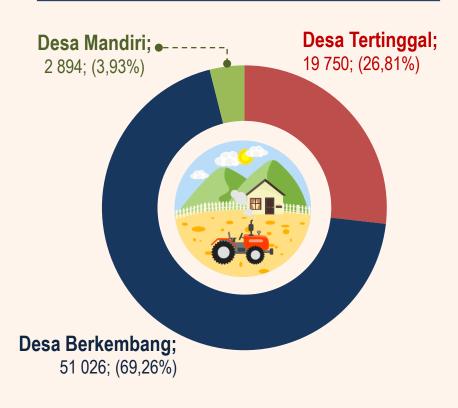
Indeks Pembangunan Desa (IPD), 2018

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu.

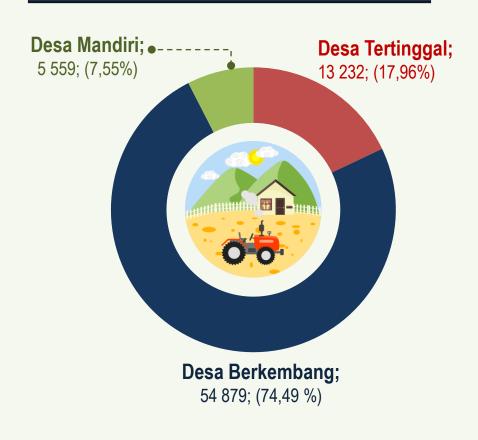


Perkembangan Pembangunan Desa 2014 - 2018





Jumlah Desa Menurut Status IPD 2018



Catatan: Perbandingan status IPD ini dilakukan untuk desa-desa yang sama dengan tahun 2014, yaitu sebesar 73 670

Target RPJMN 2015-2019

SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN



Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai dengan 5 000 desa



Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2 000 desa

HASIL PODES 2018*



Desa tertinggal berkurang sebanyak 6 518 desa

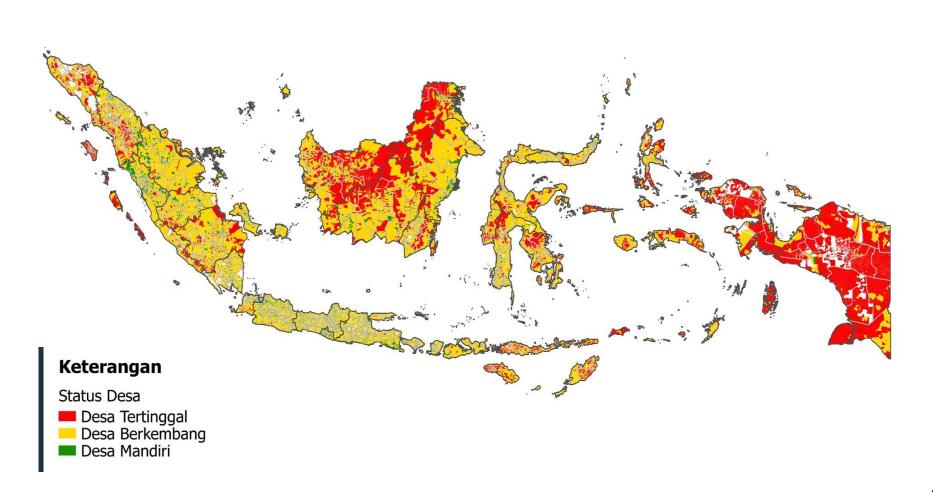


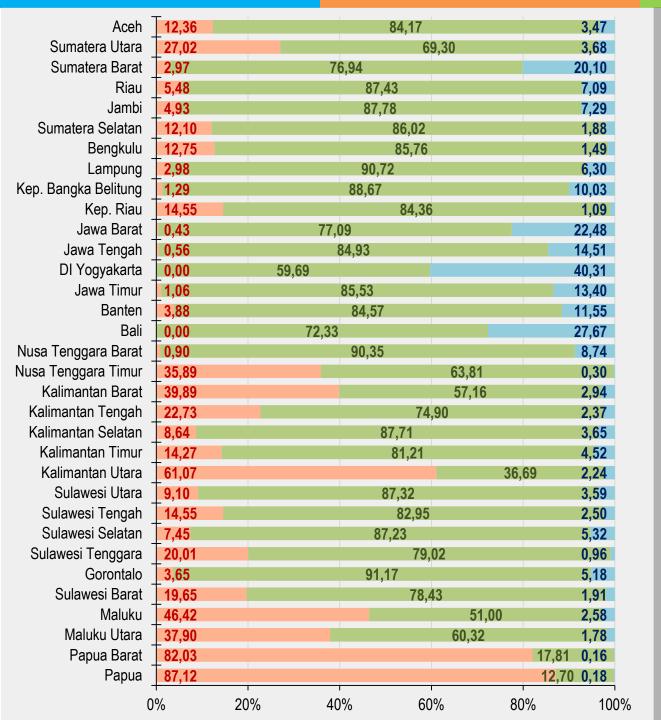
Desa mandiri bertambah sebanyak 2 665 desa

*) Penghitungan berdasarkan desa-desa yang *match* sejumlah 73 670 desa pada PODES 2014

Sebaran Desa Menurut Status IPD, 2018

Desa dengan status TERTINGGAL banyak berada di pulau Papua, Maluku, dan Kalimantan

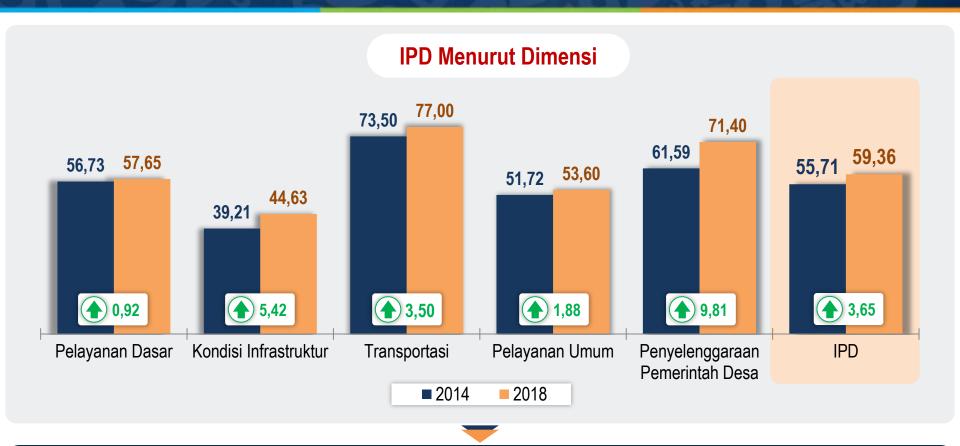




Persentase Desa Menurut Provinsi dan Status IPD, 2018



IPD Menurut Dimensi





- Secara umum semua dimensi mengalami kenaikan
- Dimensi yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Dimensi yang mengalami kenaikan paling kecil adalah Dimensi Pelayanan Dasar

Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar $(56,73 \rightarrow 57,65)$



1

Ketersediaan dan akses ke SMU sederajat (Desa yang ada SMU/MA meningkat 19% dari 2014)

Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek (Desa yang ada apotek meningkat 54% dari 2014)









Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit (Desa yang ada rumah sakit meningkat 20% dari 2014)

Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Kondisi Infrastruktur

Kondisi Infrastruktur (39,21 \rightarrow 44,63)



^{*)} Dimensi ini ada 13 indikator, 5 indikator infrastruktur ekonomi, 3 indikator infrastruktur energi, 3 indikator infrastruktur air bersih dan sanitasi, 2 indikator infrastruktur komunikasi dan informasi

Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Transportasi

Transportasi $(73,50 \rightarrow 77,00)$

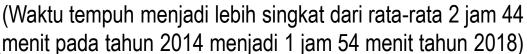


Waktu tempuh per kilometer transportasi

ke Kantor Camat

(Waktu tempuh menjadi lebih singkat dari rata-rata 1 jam 32 menit pada tahun 2014 menjadi 34 menit tahun 2018)











Lalu lintas dan kualitas jalan untuk transportasi

antardesa

(Desa dengan jalan utama aspal/beton meningkat 15% dari 2014)

^{*)} Dimensi ini ada 8 indikator, 4 indikator sarana transportasi, 4 indikator aksesibilitas transportasi

Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Pelayanan Umum

Pelayanan Umum $(51,72 \rightarrow 53,60)$



^{*)} Dimensi ini ada 4 indikator, 2 indikator kesehatan masyarakat, 2 indikator olahraga

Menilai Kemandirian Desa: Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

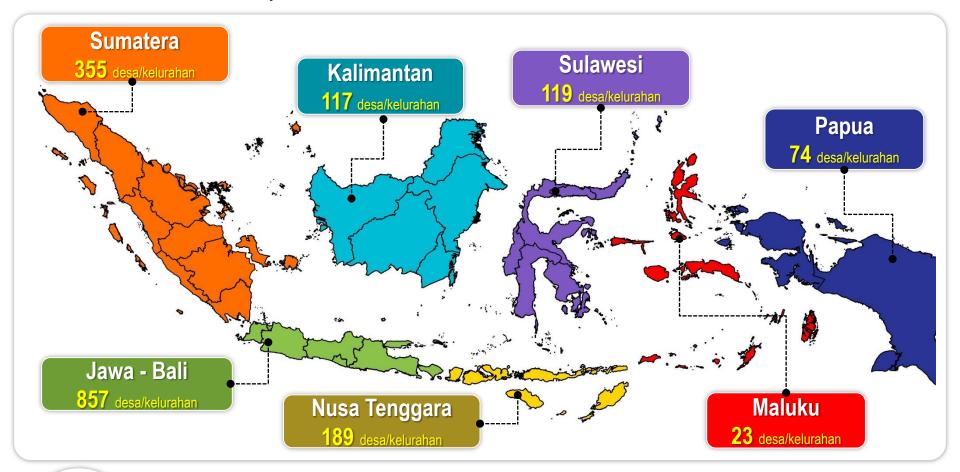
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (61,59 → 71,40)



^{*)} Dimensi ini ada 5 indikator, 3 indikator kemandirian, 2 indikator kualitas sumber daya manusia

Potensi Desa/Kelurahan 2018

Potensi Desa/Kelurahan Wisata Menurut Pulau, tahun 2018





Jumlah Desa/Kelurahan wisata meningkat dari 1.302 tahun 2014 menjadi 1.734 tahun 2018

Tantangan Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan terdampak Bencana Alam 3 Tahun Terakhir: SDGs Goal 13 Target 3





Banjir 19.675 Desa/Kelurahan



Tanah longsor 10.246 Desa/Kelurahan



Gempa bumi 10.115 Desa/Kelurahan



Kekeringan 8.587 Desa/Kelurahan



Angin puyuh/puting beliung/Topan 7.251 Desa/Kelurahan



dan lahan 4.394 Desa/Kelurahan



Banjir bandang 1.869 Desa/Kelurahan



Gelombang pasang laut 1.808 Desa/Kelurahan



Gunung meletus 623 Desa/Kelurahan

Jumlah Desa/Kelurahan menurut Upaya Mitigasi Bencana Alam 2018



Sistem Peringatan Dini Bencana Alam





Perlengkapan Keselamatan

2.738 Desa/Kelurahan



Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami

634 Desa/Kelurahan



Jalur Evakuasi

5.048 Desa/Kelurahan

Tantangan Desa/Kelurahan₍₂₎



Desa Terdampak Pencemaran Setahun Terakhir



16.847 desa/kelurahan



2.200 desa/kelurahan



8.882 desa/kelurahan

Sebanyak 61.891 desa/kelurahan tidak ada pencemaran

Tantangan Desa/Kelurahan



KEAMANAN





KESIMPULAN



Pembangunan Desa

- 1. Tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah desa/kelurahan sebesar 1.741 desa dari tahun 2014.
- 2. Perkembangan pembangunan desa yang diukur melalui IPD, mengalami kenaikan pada semua dimensi.
- 3. Potensi desa/kelurahan wisata tahun 2018 mencapai 1.734 desa



Tantangan

- 1. Masih adanya desa/kelurahan yang terdampak pencemaran lingkungan
- 2. Masih adanya desa/kelurahan yang menjadi lokasi penyalahgunaan /pengedaran narkoba
- 3. Masih adanya desa/kelurahan yang menjadi lokasi perkelahian massal



TERIMAKASIH

www.bps.go.id



bpshq@bps.go.id



Badan Pusat Statistik (Page)



